

RESEARCH ARTICLE

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Kepuasan Masyarakat Desa Waetuo

Andini Dwi Cahyani^{1*}, Nur Hikmah R², Nurul Azani Misbah³, Muh. Ikram S⁴, Nur Fadilah⁵

^{1,2,3,4,5} Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia.

Email: 2204040008@uinpalopo.ac.id¹, 2204040010@uinpalopo.ac.id², 22040400016@iainpalopo.ac.id³, muhammadikrams@uinpalopo.ac.id⁴, nurfadilah@iainpalopo.ac.id⁵

Histori Artikel:

Dikirim 24 Desember 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Januari 2026; Diterima 25 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Cahyani, A. D., R, N. H., Misbah, N. A., S, M. I., & Fadilah, N. (2026). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Kepuasan Masyarakat Desa Waetuo. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1689-1696. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6197>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang krusial untuk memastikan pengelo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 87 orang yang merupakan Desa masyarakat Waetuo. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Nilai koefisien determinasi sebesar 36,7% mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan variasi tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan kematiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting yang perlu terus ditingkatkan guna membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabiitas; Transparansi; Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability and transparency in village fund management on the level of public trust in Waetuo Village, Malangke Barat District, North Luwu Regency. Public trust is one of the most important indicators of the success of village governance, particularly in the management of village finances derived from village funds. Therefore, the application of accountability and transparency. This research uses a quantitative approach with a survey method. The sampling technique applied is proportional random sampling, involving 87 respondents from the Waetuo Village community. Research data were collected through closed-ended questionnaires developed based on indicators of accountability, transparency, and public trust. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that both partially and simultaneously, accountability and transparency have a positive and significant effect on the level of public trust. This finding indicates that the better the implementation of accountability and transparency in village fund management, the higher the level of public trust in the village government. The coefficient of determination of 36.7% indicates that accountability and transparency variables are able to explain variations in public trust, while the remaining percentage is influenced by other factors outside the research model. These findings confirm that accountability and transparency are essential factors that must be continuously improved to build and maintain public trust in village goverman.

Keyword: Accountability; Transparency; Village Fund Management.

1. Pendahuluan

Secara administratif, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Suatu negara tidak akan mencapai kemajuan jika kesenjangan pembangunan dan angka kemiskinan tetap tinggi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula, daerah tidak akan berkembang jika ketimpangan tersebut masih terjadi di tingkat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa memiliki peran krusial dalam memacu kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, Alokasi Dana Desa (ADD) berperan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan desa. Besarnya alokasi dana tersebut menuntut adanya transformasi pengelolaan yang progresif dan efektif agar dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan di wilayah pedesaan. Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat mendukung kemandirian daerah melalui pembagian sumber daya yang adil serta pemanfaatannya, dan perimbangan keuangan yang proporsional. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, khususnya dalam hal mobilisasi sumber-sumber pendanaan, penetapan arah kebijakan anggaran, serta penentuan sasaran dan prioritas penggunaan belanja daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa, diperlukan penerapan tata kelola yang baik atau *Good Governance* untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek krusial dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan keuangan desa, yang mencakup lima aspek: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul permasalahan mendasar dalam pembangunan, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima amanah (*agent*) untuk memberikan penjelasan, menyajikan informasi, menyusun laporan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan tindakan yang menjadi kewajibannya kepada pihak yang memberi amanah (*principal*). Pihak pemberi amanah berhak dan berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut serta melakukan penilaian guna memastikan bahwa kinerja pelayanan publik dan birokrasi telah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas dilakukan melalui pelaporan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Mengacu pada UU No. 28 Tahun 1999, setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang hak milik tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga lainnya, termasuk kebijakan yang ditetapkan, proses pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Menurut Mardiasmo, transparansi mencerminkan keterbukaan dalam memberikan informasi. Prinsip transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan cara menyediakan informasi serta memastikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dengan adanya rasa percaya masyarakat, tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah akan meningkat. Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas berkelanjutan. Hanafi (2019) menyatakan bahwa kualitas kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik merupakan faktor penting yang membentuk kepuasan masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan mereka dalam menetapkan strategi, arah, dan tujuan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah Desa Waetuo merupakan salah satu desa di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Dalam pembagian dana desa, setiap tahun Desa Waetuo mendapat dana desa sekitar ± Rp. 1.181.316.000 (Laporan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 mengenai penetapan pagu alokasi dana bagi pemerintah desa di

RESEARCH ARTICLE

seluruh Kabupaten Luwu Utara untuk tahun anggaran 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan sejauh mana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

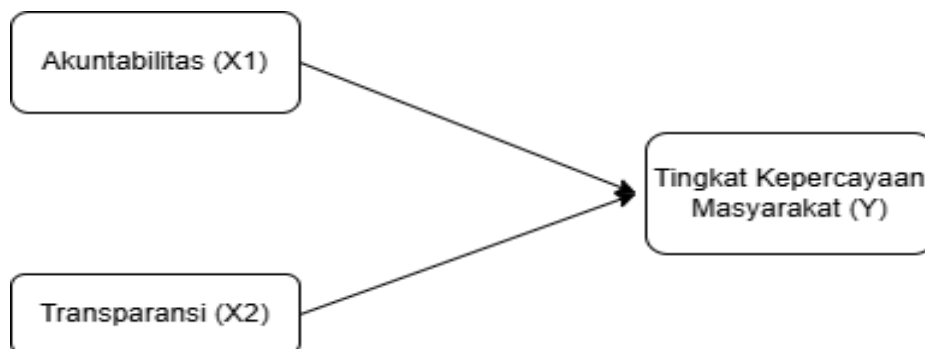
2. Tinjauan Pustaka

2.1 Stewardship Theory

Penelitian ini berlandaskan pada sebuah teori yang termasuk dalam *agency theory*, yaitu *stewardship theory* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa para manajer tidak hanya termotivasi oleh kepentingan individu, tetapi lebih fokus pada upaya mencapai tujuan keseluruhan organisasi. Teori ini beranggapan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara tingkat kepuasan dan pencapaian organisasi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa utilitas maksimal telah diraih, baik untuk kelompok *principals* maupun untuk pihak manajemen. Hubungan kontrak antara *stewards* dan *principals* dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab, di mana masing-masing pihak bekerja sama untuk mencapai sasaran organisasi. Implikasi dari teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai eksistensi Pemerintah Desa sebagai institusi yang dapat dipercaya dan berorientasi pada kepentingan publik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara tepat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai pihak *principal*.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Berdasarkan pendapat Karlinger, survei biasanya dilakukan untuk mendapatkan generalisasi dari pengamatan yang tidak terlalu mendetail. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif karena digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dari pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional random sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 87 orang yang berasal dari Desa Waetuo. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat, baik secara parsial maupun simultan, dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.



Gambar 1. Kerangka Pikir

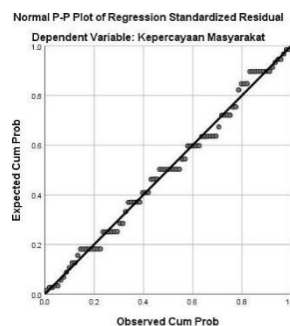
RESEARCH ARTICLE

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Bagian ini bertujuan untuk meneliti data yang telah dibahas sebelumnya dalam subbab deskripsi data. Proses analisis diawali dengan pengujian beberapa asumsi yang diperlukan untuk menggunakan teknik statistik tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk mengambil kesimpulan yang signifikan. Dalam analisis regresi linear berganda, terdapat sejumlah asumsi mendasar yang dikenal sebagai asumsi klasik regresi atau sering disebut BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian terhadap asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang diterapkan adalah model yang sah dan mampu memberikan estimasi yang optimal, tidak bias, serta efisien.



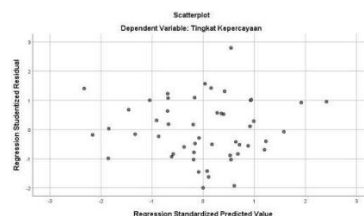
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dalam model regresi dilihat apakah variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi telah berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieralitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Akuntabilitas	.983	1.017
Transparansi	.983	1.017

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen. Pada tabel coefficients X1 dan X2 memiliki nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi terjadi varians residual yang tidak konstan. Jika varians residual konstan maka disebut dengan homoskedastisitas, sebaliknya jika varians residual tidak konstan maka disebut dengan heteroskedastisitas. Pada grafik diatas dilihat pada titik-titik (poin-poin) menyebar atau tidak membentuk pola tertentu.

RESEARCH ARTICLE

4.1.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-4.573	1.106		
	Akuntabilitas	.271	.057	.418	4.777
	Transparansi	.270	.048	.495	5.656

Pada tabel diatas hasil persamaan yang didapatkan adalah:

$$Y = -4,573 + 0,271X_1 + 0,270X_2 + e$$

- 1) Nilai konstanta sebesar -4,573 artinya jika akuntabilitas (X1) = 0 dan transparansi (X2) = 0, maka prediksi nilai tingkat kepercayaan adalah -4,573.
- 2) Akuntabilitas (X1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,271 dengan arah positif, artinya setiap kenaikan akuntabilitas sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan tingkat kepercayaan sebesar 27,1%.
- 3) Transparansi (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,270 dengan arah positif, artinya setiap kenaikan transparansi sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan tingkat kepercayaan sebesar 27%.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-4.573	1.106		
	Akuntabilitas	.271	.057	.418	4.777
	Transparansi	.270	.048	.495	5.656

Hasil uji t dari tabel diatas disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai sig. akuntabilitas (X1) = 0,000 < 0,05 berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh antara akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
- 2) Nilai sig. transparansi (X2) = 0,000 < 0,05 berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh antara transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Tabel 4. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.800	2	15.400	24.315	.000b
	Residual	53.200	84	.633		
	Total	84.000	86			

Dari hasil pengolahan pada uji f dilihat hasil bahwa Fhitung = 24,315 > Ftabel = 3,11 (dilihat dari tabel F untuk N = 87) dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

RESEARCH ARTICLE

4.1.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Nilai ini ditentukan dengan nilai R square.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606a	.367	.352	.796	2.020

Dari output pada tabel diatas nilai R Square sebesar 0,367 artinya akuntabilitas dan transparansi berpengaruh sebesar 36,7% terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Akuntabilitas yang mencakup tanggung jawab pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana desa terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa. Temuan ini dapat dilihat dari nilai signifikan pada uji t untuk variabel akuntabilitas yang mencapai 0,00. Kepercayaan masyarakat tidak hanya terbentuk dari hasil fisik pembangunan, tetapi juga dari proses yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja desa. Selain itu, keterbukaan dalam pengelolaan dana desa juga berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Waetuo. Temuan ini terlihat dari nilai signifikansi pada uji t untuk variabel transparansi sebesar 0,00. Kepercayaan masyarakat tumbuh karena mereka dapat melihat bukti nyata dari pengelolaan dana yang terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Secara bersamaan, kedua aspek ini akuntabilitas dan transparansi memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang tertera pada tabel ANOVA uji F, yaitu 0,000. Temuan ini mendorong terbentuknya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa karena mereka melihat adanya integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada analisis regresi berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, masing-masing akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, secara simultan akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah desa, disarankan untuk terus meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. 2) Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan memanfaatkan ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah desa, agar pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat berjalan secara efektif dan kolaboratif. 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel independen lain yang juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

RESEARCH ARTICLE

6. Referensi

- Arifin, M., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparency and accountability of the village government in managing village fund allocations in Arumamang Village, West Kasiruta District, South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory? *Australian Journal of Management*, 16(June), 49–66.
- Fadjar Trisakti, A., Dewi Berliana, A. D., Bukhori, A., & Fitr, A. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Fahri, Z., Sumarlin, & Jannah, R. (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 116–132.
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh pembangunan desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191–205. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.5253>.
- Gibran Khalil, & Syahril, J., & Muh, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>.
- Hartati, D. A., Monica, A., Ambo, C., Ihsan, F., Zelila, Z., Nursin, E., Pemerintahan Desa, & Article History. (2024). Penguatan kapasitas administrasi pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 85–97.
- Ilham Perdana Putra, & Darmi, T. (2022). Analisis kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa. *Journal of Public Policy and Administration*, 3(2), 2588–2593.
- Jimbaranto, G. P., Sumada, I. M., & Wirata, G. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah LPD Desa Adat Padang Luwih Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 825–833. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2671>.
- Kartius, N. A., & Angelina, N. (2024). Good governance: Transparansi layanan publik di kantor kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration*, 1(1), 14–25
- Karundeng, R., Walandouw, S. K., & Lintong, D. N. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal RAPI*, 2023, 64–77. <https://doi.org/10.58784/rapi.275>.
- Leonard, R. C. (1965). Foundations of behavioral research; educational and psychological inquiry. *Nursing Research*. <https://doi.org/10.1097/00006199-196501420-00011>.

RESEARCH ARTICLE

- Oktavianus, P., & Rahman, F. A. (2020). Teori stewardship: Tinjauan konsep dan implikasinya organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Rizaldi, M. I., Darmayanti, N., & Manaf, A. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Economics, Accounting, Auditing, Finance, and Tax*, 1(1).
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). Jurnal riset akuntansi dan bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152
- Sudibya, K. P. (2020). Perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2), 142–155
- Swasanti, I., Septian, E., & Aprilia, M. (2024). Good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 44441–4452
- Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21823>.
- Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen aparatur, kepatuhan pada regulasi terhadap kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul. *InFestasi*, 19(1), 91–102. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19551>.
- Utara, J. D. I. H. (2024). Peraturan Bupati Luwu Utara tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang penetapan pagu alokasi dana bagian pemerintah desa se-Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2024. *Peraturan Bupati Luwu Utara*. 94–96
- Yati, K., & Hanifa, L. (2021). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Kota Baubau tahun 2018-2019. *Entries*, 3(32), 213–227.